

TAJUK RENCANA

Cegah Kekerasan Seksual di Sekolah

SEBANYAK lima belas murid SD swasta di Kota Yogya menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Berita tersebut diangkat sebagai head line koran ini Rabu (10/1). Ironisnya, terduga pelaku adalah guru tidak tetap pengampu mata pelajaran konten kreator di sekolah tersebut. Kasus tersebut telah dilaporkan kepala sekolah beserta orangtua siswa ke Mapolresta Yogyakarta, Senin (8/1). Ironisnya lagi, salah satu korbannya adalah anak kepala sekolah bersangkutan.

Kasus ini tak boleh dianggap biasa, karena terjadi di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar, kota pendidikan dan sederet atribut lain. Mengapa kasus ini bisa terjadi dan baru terungkap baru-baru ini, padahal peristiwanya berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2023? Diduga, masih ada korban lain yang orangtuanya belum melapor. Pencabulan tersebut berdampak serius bagi siswasiswa karena menimbulkan trauma, bahkan ada yang tak mau sekolah.

Oknum guru berinisial NB (22) masih menyangkal perbuatannya. Diduga kuat ia melakukan pencabulan terhadap 9 murid perempuan dan 6 murid laki-laki. Yakni dengan memegang alat vital siswa, menempel pisau di leher, mengajak nonton film dewasa hingga mengajari cara open booking out (BO) di sebuah aplikasi (KR 10/1).

Bagaimana mungkin pencabulan itu bisa terjadi di saat jam pelajaran dan disaksikan murid-murid lainnya? Artinya, pencabulan itu tidak hanya disaksikan satu orang, tapi banyak murid. Dengan begitu, biarlah pelaku menyangkal, namun polisi tentu tidak berdasarkan pada keterangan ter-

duga pelaku, melainkan pada keterangan saksi dan alat bukti. Setidaknya, setelah mendapatkan dua alat bukti sah, polisi bisa langsung menetapkan NB sebagai tersangka dan ditahan.

Mengapa harus ditahan? Agar yang bersangkutan tak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta tak mengulangi perbuatannya. Ancaman pidana pencabulan terhadap anak sangatlah serius, yakni penjara maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar sebagaimana diatur UU Perlindungan Anak. Hukuman dapat diperberat sepertiganya bila pelakunya adalah orang terdekat, seperti orang tua, wali maupun pengasuh (UU No 35 Tahun 2014).

Tentu ini bukan sekadar kasus hukum. Sebab, penyelesaian secara hukum belum tentu menyelesaikan masalah. Dengan dihukumnya pelaku, tak serta merta merehabilitasi korban. Artinya, harus ada penanganan di luar hukum, yakni upaya sungguh-sungguh untuk merehabilitasi korban, menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat untuk kembali belajar dan sekolah.

Kita sangat menyayangkan kasus ini bisa terjadi, apalagi di saat jam pelajaran dan disaksikan banyak murid. Pun kita patut mempertanyakan sejauh mana pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Seharusnya ada pengawasan secara ketat terhadap proses belajar mengajar di sekolah, termasuk mengawasi perilaku guru. Kasus di atas tak boleh terulang dan ini menjadi pelajaran berharga bagi pengelola sekolah, untuk lebih intensif melakukan pengawasan terhadap kegiatan belajar-mengajar. □-d

Mitigasi dan Kewaspadaan Bencana

Cristoffer Veron Purnomo

bukan cenayang, tetapi sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang fokus menginformasikan perkembangan mutakhir mengenai cuaca, arah angin, kualitas udara, banjir, tanah longsor, gempa bumi, bahkan tsunami. Kehadiran BMKG dengan prakiraan cuaca di musim bencana alam seperti sekarang sungguh



Siapkan Mitigasi

Hidup di daerah rawan bencana, harus bersahabat dengan bencana. Sehingga bukan lagi untuk saling memperlakukan, ketika terjadi bencana. Namun saatnya kita menyiapkan selalu langkah-langkah memitigasi. Ini amat penting dilakukan agar penanganannya tuntas sampai ke akar-akarnya. Maka, dibutuhkan kolaborasi kuat dengan berbagai pihak terkait untuk fokus menangani bencana alam.

Memitigasi bencana alam merupakan sebuah keharusan yang semestinya dilakukan. Termasuk kesiapan relawan yang berjiwa tangguh dan ikhlas di setiap daerah untuk membantu menanganinya bencana alam. Hal itu juga perlu ditopang dengan peningkatan kapasitas relawan agar lebih sistematisasi untuk mengenali risiko, penayadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan lain sebagainya.

Hanya saja, pengejawantahan dari memitigasi tersebut tidak cukup sekadar dilakukan pada momentum datangnya bencana alam. Justru kewaspadaan dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Akan lebih eloknya jika dilakukan setiap saat. Tujuannya agar dapat meminimalisasi jatuhnya korban akibat yang ditimbulkan dari musibah tersebut. Kita berdoa, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Aamiin. □-d

* Cristoffer Veron Purnomo

Sekretaris Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Reporter Suara Muhammadiyah

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

MEMASUKI tahun baru 2024 yang baru seminggu, kita semua dikejutkan dengan rentetan bencana alam yang datang silih berganti. Musibah ini diawali dengan musim hujan yang ditandai hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Dampaknya?

Koran Kedaulatan Rakyat Kamis (4/1) memberitakan sejumlah pohon bertumbangan di wilayah Sleman dan Gunungkidul yang mengakibatkan sejumlah rumah rusak. Bahkan Jumat (5/1), koran ini juga menurunkan berita sebuah kanopi di area drop off pintu selatan Stasiun Tugu Yogyakarta ambruk dan menimpa lima unit mobil di bawahnya. Juga sebatang pohon ambruk dan menimpa kuda sebuah andong.

Kita bisa mempermaklumkan negeri ini rawan bencana. Setiap kita tentu tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun, ancaman akan bencana alam selalu ada setiap tahunnya. Di awal tahun saja beragam peristiwa bencana alam mulai tampak dan dirasakan dampaknya sangat berarti bagi kita semua. Maka, kita harus senantiasa waspada (KR, 5/1). Sikap kewaspadaan ini sangat relevan dalam orientasi melindungi diri sendiri dan keluarga dari korban berikutnya akibat bencana alam tersebut.

Peringatan BMKG

Rentetan bencana alam di awal tahun, mestinya tidak harus membuat kita terkejut apalagi bingung. Pasalnya BMKG sudah jauh-jauh hari telah mengeluarkan peringatan dini ihwal potensi terjadinya bencana alam berupa cuaca ekstrem. Peringatan baru selalu disampaikan dan diperbarui. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini bukan sebuah ramalan, akan tetapi sebagai bentuk mengantisipasi bagi kita bersama akan potensi terjadinya musibah bencana alam.

Peringatan yang dikeluarkan BMKG menjadi barometer bagi kita. BMKG

sangat dibutuhkan. Maka, kita tentu bersyukur bahwa BMKG selalu aktif menyebarkan informasi terupdate baik melalui website maupun akun media sosialnya.

Dari prakiraan, BMKG mengeluarkan peringatan. Tentu agar bisa lebih *elingan* waspada terhadap pelbagai bencana alam yang mungkin saja masih terjadi sampai beberapa hari ke depan. Prakiraan itu bisa saja salah dan benar. Yang terpenting ialah kita harus selalu berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Dengan demikian, maka kita telah berupaya untuk menyelamatkan diri dan keluarga serta tidak menjadi korban bencana yang menerpa.

Supremasi Hukum, Fondasi Pemilu Berkeadilan

PEMILIHAN umum merupakan pilar utama dalam menjaga demokrasi sebuah negara. Proses ini tidak hanya memastikan perwakilan yang adil bagi warga negara. Tetapi juga mengukuhkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam setiap tahapan pemilu. Konsep supremasi hukum pada pemilu menjadi landasan yang memastikan transparansi, keadilan, dan keabsahan proses politik.

Supremasi hukum pada pemilu mempunyai basis kuat dalam kerangka konstitusi sebuah negara. Prinsip-prinsip ini terwujud dalam undang-undang yang mengatur setiap aspek pemilihan umum, mulai dari proses pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara. Konstitusi yang jelas dan tegas menjadi payung bagi supremasi hukum dalam memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis yang adil dan transparan.

Kredibilitas Institusi

Aspek kunci dari supremasi hukum pada pemilu adalah kemandirian lembaga-lembaga terkait, seperti komisi pemilihan umum atau badan pengawas pemilu. Kemandirian ini memastikan bahwa proses pemilu tidak dipengaruhi kepentingan politik atau pihak tertentu, melainkan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Kredibilitas institusi-institusi ini menjadi kunci dalam memastikan pemilu yang bebas dari manipulasi dan kecurangan.

Kemandirian institusi terkait pemilu mencakup independensi dari pengaruh politik. Ini berarti bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak boleh terikat dengan kepentingan politik partai tertentu. Pengangkatan anggota dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada kualifikasi, integritas, dan kompetensi. Bukan pada afiliasi politik.

Kemandirian institusi terkait pemilu juga berarti perlindungan dari tekanan eksternal. Ini mencakup perlindungan

Budi Prasetyo

terhadap ancaman fisik, intimidasi, atau intervensi yang dapat mengganggu proses pemilihan. Dukungan yang diberikan kepada lembaga-lembaga ini, baik dari sisi keamanan maupun sumber daya, penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa tekanan eksternal.

Kredibilitas institusi terkait juga terletak pada kemampuan mereka untuk mengawasi dan menyelenggarakan pemilu dengan transparan dan adil. Proses pemilihan umum yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasilnya. Institusi-institusi ini juga harus memiliki kapasitas untuk menangani aspek teknis maupun administratif dalam pemilu, seperti pemutakhiran daftar pemilih, pengaturan tempat pemungutan suara, dan perhitungan suara.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu tidak dapat diabaikan. Institusi terkait harus terbuka terhadap publik dan memberikan informasi yang jelas tentang proses pemilihan. Akuntabilitas juga penting. Lembaga-lembaga ini harus siap bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil selama proses pemilu.

Kepentingan Publik

Pentingnya supremasi hukum dalam pemilu tidak hanya terletak pada keadilan proses, tetapi juga pada kepentingan publik secara keseluruhan. Pemilihan umum yang dijalankan dengan prinsip-prinsip supremasi hukum memungkinkan terpilihnya para pemimpin yang diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat dengan adil dan bertanggung jawab.

Supremasi hukum pada pemilu juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak pemilih. Ini termasuk hak untuk memilih tanpa tekanan atau intimidasi, akses yang adil dan setara terhadap informasi, serta jaminan bahwa setiap suara akan dihitung dengan benar.

Di bawah supremasi hukum, penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemilu menjadi esensial. Ini tidak hanya mencakup sanksi bagi pelaku pelanggaran tetapi juga memastikan pemulihan integritas proses pemilihan.

Pentingnya supremasi hukum pada pemilu tidak boleh diabaikan. Hal ini adalah fondasi dari keadilan, kepercayaan publik, dan stabilitas dalam sebuah negara. Dengan memastikan bahwa setiap tahap pemilu dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang ada, kita mengukuhkan esensi sejati dari demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. □-d

* Budi Prasetyo, Penggerak Serikat

Dosen Progresif, pengajar hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY).

Pojok KR

Belasan murid SD di Kota Yogya jadi korban pelecehan seksual.

-- Ironi di kota pendidikan, perketat pengawasan.

Nomor telepon pimpinan DKPP diretas.

-- Pasti ada kepentingan politiknya.

KPU tak ubah format debat capres, karena kesepakatan timses.

-- Tapi harus berani tertibkan penonton.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Spanduk Pro-kontra Sunmor UGM

MINGGU (7/1) lalu usai kondangan, kami pulang melalui jalan Prof Dr Notonagoro (jalan baru UGM). Kaget, karena jalanan macet. Perjalanan sedikit merambat baru kemudian melihat ada beberapa pick-up sedang merapikan dagangan dan juga masih ada tenda dan transaksi makanan di situ. Ini yang membuat jalan terhambat.

Tiba-tiba jadi teringat ramainya jalan itu dulu jika Hari Minggu, karena 'pasar minggu' ini berpindah dari UGM ke kawasan Kuningan. Dan jam pulang kondangan adalah jam mereka selesai berjualan. Realita yang membuat kami sadar bahwa Sunmor hadir kembali setelah cukup lama menghilang, karena pandemic covid-19.

Karena perjalanan merambat bisa tengok kiri kanan. Yang lucu di dinding pagar Fakultas Peternakan (kalau tidak salah) ada terbentang dua spanduk yang membuat tersenyum. Yang satu berisi tulisan : *Pemberitahuan, larangan berjualan sepanjang jalan tersebut, karena belum ada izin terkait. Dan segala tindakan yang dilakukan Sunmor UGM tidak ada kaitan dan tanggungjawab Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Kepanewonan Depok.* Sementara spanduk yang lain yang terbentang tepat di sampingnya tertulis kalimat : *Warga Karangmalang - Kuningan, mendukung dibukanya Sunmor UGM mulai tanggal 7 Januari 2024 dan seterusnya.*

Jadi harus bagaimana ini? □-d

**) Aisyah, Deresan Sleman*

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Stutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permukiman, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujijanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guño Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP